

ISLAMISASI NUSANTARA: SEJARAH, DINAMIKA POLITIK DAN PERKEMBANGAN SOSIAL-BUDAYA

Maftuh Ajmain

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

maftuh@uinbanten.ac.id

Abstract

This article discusses the process of Islam's entry and development in Indonesia from the early days of maritime contact between the archipelago and the Islamic world to the post-independence period. The study was conducted by examining theories of Islam's arrival, the development of Islamic kingdoms, socio-cultural dynamics, and political changes from the colonial to the modern era. Using a historical approach and document analysis, this paper maps the long journey of Islam as a cultural, social, and political force in Indonesia. This study confirms that the Islamisation of the archipelago took place gradually, peacefully, and adaptively through trade routes, political power, and religious education. The implications of this formed the distinctive character of Indonesian Islam—moderate, pluralistic, and layered according to the social conditions of each region.

Keywords: Islamisation of the Archipelago, History, Political Dynamics, Socio-Culture.

Abstrak

Artikel ini membahas proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia sejak masa awal kontak maritim antara Nusantara dan dunia Islam hingga periode pasca-kemerdekaan. Kajian dilakukan dengan menelaah teori-teori kedatangan Islam, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam, dinamika sosial-budaya, serta perubahan politik dari masa kolonial hingga masa modern. Dengan memanfaatkan pendekatan historis dan analisis dokumen, tulisan ini memetakan perjalanan panjang Islam sebagai kekuatan budaya, sosial, dan politik di Indonesia. Studi ini menegaskan bahwa Islamisasi Nusantara berlangsung secara bertahap, damai, dan adaptif melalui jalur perdagangan, kekuasaan politik, serta pendidikan keagamaan. Implikasinya membentuk karakter Islam Indonesia yang khas—moderat, plural, dan berlapis sesuai kondisi sosial masing-masing daerah.

Kata Kunci: Islamisasi Nusantara, Sejarah, Dinamika Politik, Sosial-Budaya.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu kawasan dunia yang memiliki perjalanan sejarah Islam paling panjang, dinamis, dan kompleks. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara tidak hanya meninggalkan jejak keagamaan, tetapi juga memengaruhi hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat, mulai dari sistem sosial, budaya, politik, hingga tatanan pendidikan. Keberagaman etnis, bahasa, dan kebudayaan yang ada di wilayah kepulauan ini menjadi konteks sosial yang signifikan dalam membentuk corak keislaman yang khas, moderat, dan adaptif. Oleh karena itu, kajian mengenai sejarah Islam di Indonesia selalu menarik dan terus menjadi objek penelitian akademis, terutama dalam memahami proses transformasi sosial keagamaan sepanjang masa.

Salah satu aspek penting yang perlu dipahami adalah bagaimana Islam pertama kali masuk dan menyebar di Nusantara. Berbagai teori muncul terkait asal kedatangan Islam,

para pembawanya, serta waktu masuknya ke wilayah kepulauan ini. Perdebatan di kalangan ahli sejarah menunjukkan bahwa kedatangan Islam di Indonesia bukanlah proses tunggal dan sederhana, melainkan rangkaian interaksi panjang yang melibatkan jaringan perdagangan internasional, hubungan diplomatik, serta gerak migrasi para pendakwah dan komunitas muslim dari berbagai belahan dunia. Teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia hanyalah tiga contoh upaya ilmiah dalam menjelaskan dinamika awal islamisasi Nusantara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji proses masuk, perkembangan, serta dinamika Islam di Indonesia dari masa awal hingga era kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian merupakan fenomena historis yang memerlukan penelusuran sumber-sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan perkembangan Islam di Nusantara.

Sedangkan Jenis penelitian ini adalah **penelitian kualitatif deskriptif-historis**. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami data dalam bentuk narasi, teks, serta dokumen sejarah yang tidak dapat dikuantifikasi. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk merekonstruksi fakta secara kronologis mengenai kedatangan Islam, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam, peran tokoh dan lembaga, serta dinamika sosial keagamaan dalam setiap periode sejarah.

Pendekatan historis yang digunakan meliputi empat tahapan utama: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Keempat tahapan ini memadai untuk menyusun kajian sejarah yang kritis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masuknya Islam di Nusantara

Sejauh menyangkut kedatangan Islam di kepulauan Nusantara ini, terdapat diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli mengenai tiga masalah pokok: tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya dan waktu kedatangannya. Berbagai teori dan pembahasan yang berusaha menjawab ketiga masalah pokok ini masih belum tuntas, tidak hanya karena kurangnya data yang mendukung suatu teori tertentu, tetapi juga karena sifat sepihak dari berbagai teori yang ada.¹

Menurut Ricklefs, secara umum ada dua proses yang mungkin telah terjadi. *Pertama*, penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Proses *kedua*, orang-orang asing (Arab, India, Cina dan lain-lain) yang telah memeluk agama Islam tinggal secara tetap di suatu wilayah Indonesia, kawin dengan penduduk asli, dan mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa sehingga mereka sudah

¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Bandung: Mizan, 1995), hal. 24; Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 26.

menjadi orang Jawa, Melayu dan suku lainnya.² Namun dapat dipastikan, lanjut Ricklefs, bahwa Islam sudah ada di nusantara sejak awal zaman Islam. Dari masa Khalifah ketiga, Usman bin Affan (644-656), utusan-utusan muslim dari tanah Arab mulai tiba di istana Cina. Setidaknya pada abad ke-9 sudah ada ribuan pedagang muslim di Kanton. Kontak-kontak antara Cina dan dunia Islam itu terpelihara terutama lewat jalur laut melalui Indonesia.³

Para sarjana yang mendalami sejarah Islam di Indonesia menyatakan bahwa Islam dibawa masuk ke wilayah ini oleh para pedagang di Arab, Persia dan India. Mereka juga menunjukkan bahwa hubungan perdagangan antara kepulauan Indonesia dan Arab sudah mulai berlangsung bahkan sebelum kedatangan Islam. Pada abad kedelapan dan kesembilan, terutama pada puncak masa kerajaan Sriwijaya, beberapa pelabuhan di wilayah ini sudah amat dikenal oleh para pedagang. Wilayah ini sudah hampir merupakan wilayah tempat bercampur kebudayaan Arab, India, Persia dan Cina.⁴

Kebanyakan sarjana Belanda, seperti Pijnappel dari Universitas Leiden, Moquette, dan Snouck Hurgonje, berpendapat bahwa abad ke-12 adalah periode yang paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam di Indonesia.⁵

Namun setidaknya terdapat tiga teori tentang masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Arab dan teori Persia.⁶

Teori Gujarat yang didukung oleh Moquette mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat dengan alasan bahwa relief nisan yang pertama dari Kerajaan Samudera Pasai, yakni Malik al-Saleh yang wafat pada 1297 mempunyai kesamaan dengan nisan yang terdapat di Gujarat.⁷ Namun kesimpulan ini ditentang oleh Fatimi yang berargumen bahwa keliru mengaitkan seluruh batu nisan di Pasai dengan batu nisan di Gujarat. Menurut penelitiannya, bentuk dan gaya batu nisan Malik al-Saleh berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat dan batu-batu nisan lain yang terdapat di Nusantara.⁸

Teori Arab berpendapat bahwa Gujarat hanyalah sebagai tempat persinggahan semata, sementara Mekkah atau Mesir tetap merupakan pusat pengambilan ajaran Islam. Jauh sebelum abad ke-12 atau ke-13, bangsa Arab telah berperan dalam membawa agama Islam ini ke Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya perkampungan perdagangan Arab Islam pada 674 di pantai Barat Laut Sumatera, yaitu Barus. Informasi ini bersumber dari berita Cina bahwa di masa Dinasti Tang (abad ke-9-10) orang-orang Ta-Shih sudah ada di Kanton (Kan-fu) dan Sumatera. Ta-Shih adalah sebutan untuk orang-orang Arab dan Persia, yang ketika itu jelas sudah menjadi Muslim.⁹

Teori Arab ini juga didukung oleh sebagian ahli Indonesia. Dalam seminar yang diselenggarakan pada 1969 dan 1978 tentang kedatangan Islam ke Indonesia mereka

² M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Cet.II, Alih bahasa Satrio Wahono dkk. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hal. 27.

³ *Ibid.*

⁴ Alwi Shihab, *Membendung Arus*, hal. 26.

⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*, hal. 24.

⁶ Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 78.

⁷ Enung K. Rukiati dan Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 23.

⁸ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*, hal. 25.

⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. ke-16, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 192.

menyimpulkan, Islam datang langsung dari Arabia, tidak dari India; tidak pada abad ke-12 atau ke-13 melainkan dalam abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi.¹⁰

Teori Persia yang dikemukakan oleh Hossein Djajadiningrat lebih menitik-beratkan pada kebudayaan yang hidup di kalangan Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai kesamaan dengan Persia. Kesamaan kebudayaan ini dapat dilihat pada masyarakat Indonesia, antara lain:

1. Peringatan 10 Muharram atau al-Syuro sebagai peringatan Syiah atas kematian syahidnya Husein.
2. Adanya persamaan ajaran Syaikh Siti Jenar dengan ajaran sufi Iran al-Hallaj.
3. Sistem mengeja huruf Arab, untuk tanda-tanda bunyi harkat dalam pengajian al-Qur'an tingkat awal: *jabar-zabar* untuk harkat *fathah*, *jer-zerr* untuk harkat *kasrah*, dan *p'es-py'es* untuk harkat *dhammah*.

Huruf *sin* yang tidak bergigi berasal dari Persia, sedangkan *sin* yang bergigi berasal dari Arab.¹¹

Namun K.H. Saifuddin Zuhri menolak pendapat teori Persia ini. Menurutnya, bila berpedoman pada masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-7, hal ini berarti terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Umayyah. Pada saat itu, kepemimpinan Islam di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan ada di tangan Arab, sedangkan pusat perkembangan Islam berkisar di Mekkah, Madinah dan Damaskus serta Bagdad. Jadi, menurutnya lebih lanjut, tidak mungkin Persia menduduki kepemimpinan dunia Islam.¹²

Namun agaknya kenyataan yang sulit dipungkiri adalah bahwa proses Islamisasi di berbagai daerah di Indonesia tidaklah bersamaan.¹³ Ada daerah yang lebih awal didatangi Islam, seperti Peureulak dan Pase di Sumatera Utara,¹⁴ dan ada daerah yang lebih akhir seperti Jawa dan sekitarnya.

Implikasi dari proses Islamisasi yang gradual ini adalah munculnya pelaksanaan ajaran-ajaran Islam yang bertingkat-tingkat, sangat bervariasi dari satu kelompok ke kelompok yang lain atau dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ada yang menerima dan menjalankan secara taat prasyarat mutlak yang dituntut dalam keimanan Islam dan ada pula mereka yang, sementara terus menegaskan diri sebagai penganut Islam, tidak menjalankan praktik-praktik keislaman sepenuhnya. Pada satu sisi, terdapat mereka yang berusaha, jika memungkinkan, membangun masyarakat mereka sejalan dengan citra Islam yang paling ekstrim dan mendirikan negara Islam; sedangkan pada sisi yang lain terdapat kelompok yang masih sangat tertarik kepada kebudayaan-kebudayaan masa lalu, dan tidak lebih dari kaum muslim nominal.

Di Jawa, tempat Islam sudah hampir enam abad berusaha memengaruhi seluruh aspek kehidupan sosial, pelaksanaan ajaran-ajaran Islam berlangsung kurang ketat jika dibandingkan dengan di pusat-pusat Islam lain yang utama seperti Aceh, Sumatera Barat,

¹⁰ A. Hasymi (Peny.), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989), hal. 7.

¹¹ Enung K. Rukiati dan Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan*, hal. 26.

¹² Saifudin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), hal. 188.

¹³ Abu Bakar Atjeh, *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*, (Semarang: Ramadhani, 1971), hal. 11.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 6; Lihat juga, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 111.

dan Sulawesi Selatan.¹⁵ Situasi ini semakin diperparah oleh kedatangan Belanda pada masa-masa dua abad pertama kedatangannya. Penjahat Belanda membatasi kontak-kontak antara Islam di Jawa dan negara-negara Islam yang lain. Hal inilah yang ikut menyebabkan pertumbuhan kelompok-kelompok masyarakat yang kuat keislamannya menjadi tersendat-sendat.¹⁶ Pada akhir abad ke-19, Poensen mengamati mayoritas orang Jawa sebenarnya tidak mengenal Islam kecuali dalam hal sunatan (*circumcision*), puasa dan larangan makan daging babi.¹⁷

Islam di Indonesia Sebelum Kemerdekaan

Seperti dikemukakan di atas bahwa penyebaran Islam di Indonesia pertama-tama dilakukan oleh para pedagang yang menggunakan jalur laut dan bersandar di pelabuhan-pelabuhan. Oleh karena itu, Islam di daerah pesisir relatif lebih ketat dibanding Islam di pedalaman atau pegunungan. Kerajaan-kerajaan Islam berdiri juga di sekitar pesisir, seperti kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Cirebon, Ternate dan Tidore. Dari daerah pesisir ini, kemudian Islam menyebar ke daerah-daerah pedalaman atau pegunungan. Menjelang akhir abad ke-17, pengaruh Islam sudah hampir merata di berbagai wilayah penting di Nusantara.¹⁸

Cepatnya Islam diterima oleh penduduk nusantara dikarenakan pengaruh agama yang sebelumnya ada, yakni Hindu dan Budha, tidak berakar kuat di lapisan bawah masyarakat. Pengaruh Hindu-Budha hanyalah lapisan tipis yang meresap di kalangan elit-elit kerajaan. Masyarakat umumnya yang jauh dari pusat-pusat kerajaan tetap hidup dalam kebudayaan aslinya.¹⁹

Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Budha segera digantikan oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam yang jumlahnya kurang lebih mencapai 200 kerajaan. Di antara kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yaitu: Di pulau Sumatera terdapat kerajaan Perlak, Samudra Pasai, Aceh dan Malaka. Di Jawa, terdapat kerajaan Demak, Cirebon, Banten, Pajang dan Mataram. Di Kalimantan, terdapat kerajaan Banjar. Di Sulawesi terdapat kerajaan Gowa-Tallo (Makassar). Di Maluku, terdapat kerajaan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo.²⁰

Samudra Pasai diakui sebagai kerajaan Islam pertama. Tanggal tahun yang terukir di batu nisan Malik al-Saleh, 1297, diterima di kalangan para ahli sejarah sebagai tahun berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Diperkuat pula dengan sumber lokal yakni sebuah teks yang berjudul *Hikayat Raja-raja Pasai* mencatat bahwa Malik al-Saleh adalah raja muslim pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Teks tersebut juga menuturkan bahwa Merah Silu – nama Malik al-Saleh sebelum masuk Islam – membangun sebuah istana di satu wilayah di Sumatra, Pasai. Merah Silu berganti nama menjadi Malik al-Saleh dan Samudra Pasai

¹⁵ Alwi Shihab, *Membendung Arus*, hal. 29.

¹⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1983), hal. 9; Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*, hal. 57-58.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 11.

¹⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, hal. 299.

¹⁹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia*, Cet. ke-7 (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), 16.

²⁰ Ahmad Choirul Rofiq, *Cara Memahami Sejarah Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal.372.

selanjutnya disebut *Samudra dar al-Islam*, yang menandakan bahwa kerajaan ini telah bercorak Islam.²¹

Hal yang sama juga terjadi pada kerajaan Malaka. Parameswara, pendiri pertama dan sekaligus pembangun kerajaan tersebut, adalah pula raja pertama yang masuk Islam atas jasa para ulama yang datang dari Samudra Pasai. Namanya berubah menjadi Sultan Iskandar Shah.

Dari fakta di atas dapat dikatakan bahwa Islamisasi di nusantara berlangsung sejalan dengan rekayasa politik di kerajaan. Proses pengislaman masyarakat berjalan efektif ketika Islam terintegrasi ke dalam sistem politik kerajaan, yang berbasis pada perkembangan ekonomi maritim internasional. Demikian di Samudra Pasai dan Malaka, terutama pada masa perkembangannya, integrasi Islam dan politik terefleksikan dengan jelas dalam perilaku politik para penguasa di kerajaan.²²

Sultan-sultan yang memerintah kerajaan Samudra Pasai berturut-turut adalah Sultan Malik al-Saleh (w. 696 H/1297 M), Sultan Muhammad Malik al-Zahir (lebih kurang 1346-1383), Sultan Zain al-Abidin Malik al-Zahir (1383-1405), Sultanah Nahrisyah (1405-1412, wafat 12 September 1428), Abu Zaid Malik al-Zahir (1412-?), dan Mahmud Malik al-Zahir (1513-1524).²³

Kerajaan Samudra Pasai mempunyai peran penting di dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Samudra Pasai berhubungan erat dengan Malaka bahkan mengadakan hubungan pernikahan antara putra-putra Sultan Samudra Pasai dengan Malaka. Sehingga pada awal abad ke-15 atau 1414 tumbuhlah kerajaan Islam Malaka.

Namun sejak Portugis menguasai Malaka tahun 1511 dan meluaskan kekuasaannya, kerajaan Islam Samudra pasai mulai dikuasai sejak tahun 1512. Kemudian Kerajaan Aceh Darussalam di bawah Sultan al-Mughayat Syah lebih berhasil menguasai Samudra Pasai. Kerajaan-kerajaan Islam yang terletak di pesisir seperti Aru, Pedir, dan lainnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam Aceh Darussalam yang sejak abad ke-16 makin mengalami perkembangan politik, ekonomi-perdagangan, kebudayaan dan keagamaan.

Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncaknya pada abad ke-16 dan 17. Sejak menaklukkan Malaka, para pedagang muslim mancanegara yang sebelumnya berdagang di Malaka beralih ke Aceh. Sultan Ali Mughayat Syah (w. 1530) adalah orang yang selama ini dianggap sebagai pendiri dari kerajaan Aceh Darussalam ini. Selama masa kekuasaannya, Aceh tidak hanya terbatas di lembang sungai Aceh, yang kemudian dikenal dengan Aceh Besar, tapi sudah menjangkau beberapa wilayah lain di sekitarnya.

Pada 1520 dia menaklukkan Daya di ujung barat, dan selanjutnya Pidie dan Pasai di belahan timur pada masing-masing 1521 dan 1524. Ali Mughayat Syah (1465-1497) dalam hal ini telah meletakkan landasan yang kokoh bagi berkembangnya kerajaan Aceh di tangan para penggantinya kemudian, sehingga kerajaan tersebut muncul sebagai satu kekuatan Islam terkemuka di nusantara.²⁴

²¹ Taufik Abdullah dan Endjat Djaenuderadjat, *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia*, Jilid 1 (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud, 2015), hal. 174.

²² *Ibid.*, hal. 179.

²³ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan*, hal. 23.

²⁴ Taufik Abdullah dan Endjat Djaenuderadjat, *Sejarah Kebudayaan Islam*, hal. 180.

Kerajaan Aceh berdiri pada awal abad ke-16 dengan adanya penyatuan dua kerajaan kecil, Lamri dan Aceh Dar al-Kamal. Dua kerajaan ini digabungkan oleh Sultan Ali Mughayat Syah sehingga ia dianggap sebagai pendiri dari kerajaan ini. Setelah ia wafat, pemerintahan selanjutnya dipegang oleh putra tertuanya, Salahuddin. Pada 1537, ia menyerang Malaka yang kemudian mengalami kegagalan. Salahuddin diganti saudaranya yaitu Alauddin Riayat Syah al-Kahhar (1537-1568). Pada periode Alauddin ini, Aru dan Johor berhasil ditaklukkan Aceh dan Aceh kembali melakukan perlawanan terhadap Portugis di Malaka dengan dibantu oleh dinasti Turki Usmani.²⁵

Alauddin Riayat Syah selanjutnya digantikan oleh Sultan Ali Riayat Syah (1568-1573), kemudian Sultan Sri Alam, Sultan Muda (1604-1607), dan Sultan Iskandar Muda, gelar Mahkota Alam (1607-1636). Aceh mengalami kemakmuran dalam periode sultan yang disebutkan terakhir ini. Kekuasaannya meluas di sepanjang timur dan barat Sumatera. Johor di Semenanjung Malaysia juga diserang yang kemudian mengakui kekuasaan kesultanan Aceh Darussalam.

Hubungan politik dengan negeri-negeri di Timur Tengah makin ditingkatkan dan demikian pula hubungan perdagangan selain dengan Mesir, Turki, Arab, juga dengan Prancis, Inggris, Afrika, India, Cina dan Jepang. Komoditas-komoditas yang diimpor antara lain: beras, guci, gula (sakar), sakar lumat, anggur, kurma, timah putih dan hitam, besi, tekstil dari katun, kain batik mori, piringan dan mangkuk, kipas, kertas, opium, air mawar, dan lain-lain. Sedangkan komoditas ekspor dari Aceh sendiri antara lain: kayu cendana, saapan, gandarukem (resin), damar, getah perca, obat-obatan dan parfum, rasamala, kapur barus, bunga lawang, lada, gading, lilin, tali sabuk, sutra, porselin, pakaian, minyak dan emas.²⁶

Pada awal abad ke-19, kesultanan Aceh mendapatkan ancaman kolonialisme Belanda secara terus-menerus. Sejak tahun 1873 hingga 1904 terjadi peperangan yang hebat yang dikenal dengan Perang Aceh. Dengan cara memisahkan kesatuan kekuatan antara ulama dengan kaum bangsawan, satu persatu pemimpin pasukan Aceh seperti Cik Di Tiro dan Muhammad Syaman jatuh ke tangan militer Belanda. Teuku Umar terlebih dahulu lumpuh yang kemudian wafat tanggal 11 Februari 1899. Sedangkan isterinya Cuk Nyak Dien ditangkap dan kemudian diasingkan ke Sumedang pada tahun 1906. Sultan Muhammad Daud Syah yang menggantikan Mahmud Syah ditangkap Belanda, dan dibuang ke Ambon pada 1907 hingga meninggal tahun 1939.²⁷

Selain kerajaan-kerajaan Islam di atas, di Sumatera terdapat pula kerajaan-kerajaan Islam yang lain seperti Siak, Kampar dan Inderagiri. Semua kerajaan ini berlokasi di Riau sekarang. Ketiga kerajaan ini senantiasa melakukan perdagangan dengan Malaka, bahkan memberikan upeti kepada kerajaan Malaka. Ketiga kerajaan ini dikuasai Malaka pada masa Sultan Mansur Syah (wafat 1477). Karena Belanda menguasai Malaka pada 1641, maka praktis ketiga kerajaan ini pula di bawah kendali Belanda.

²⁵ Atif Rahman, "Peran Kerajaan Aceh Melawan Penjajahan dan Menyebarkan Islam di Nusantara pada Abad 16-18 M", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'ri: Salam*, Volume 8 No. 5 (2021), hal. 1334.

²⁶ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan*, hal. 31.

²⁷ Ahmad Choirul Rofiq, *Cara Memahami Sejarah Islam* (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), hal.375.

Di Jambi, kerajaan Islam tumbuh dan berkembang sekitar tahun 1500 di bawah pemerintahan Orang Kayo Hitam. Kerajaan Islam Jambi mulai melakukan hubungan perdagangan dengan VOC di bawah pemerintahan Sultan Abdul Kahar. Dengan izin sultan Jambi pada 1616, VOC (Belanda) mendirikan lojinya di Muara Kompeh. Hubungan dengan VOC menjadi regang karena sultan enggan menjual hasil buminya kepada VOC. Pada 1642, Jenderal Antonio van Diemen menuduh Jambi bekerja sama dengan Mataram. Akhirnya Sultan Abdul Kahar berhenti atas desakan VOC dan digantikan oleh Sultan Abdul Jalil yang sejalan dengan VOC. Pada perkembangan kemudian, VOC dengan kesultanan Jambi terus berkonflik yang puncaknya terjadi perang pada masa Sultan Taha Saifuddin. Di daerah Batanghari Hulu, Sultan Taha gugur tanggal 1 April 1904 dan dimakamkan di Muaratebo.²⁸

Di Palembang, Sumatera Selatan, kesultanan pertama yang berkuasa tercatat bernama Susuhunan Sultan Abdurrahman Khalifat al-Mukminin Sayidil Iman/Pangeran Kusumo Abdurrahim/Kyai Mas Endi yang berkuasa sejak 1659 sampai 1706. Palembang berturut-turut diperintah oleh 11 sultan dan sultan yang terakhir berkuasa yaitu Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom bin Sultan Susuhunan Husin Dhiauddin. Kontak pertama kesultanan Palembang dengan VOC terjadi pada tahun 1610 yang kemudian menghapuskan kesultanan tersebut pada 7 Oktober 1823.

Adapun Islamisasi di Jawa berlangsung sejak abad ke-11 M terbukti dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maemun di Loran, Gresik, yang berangka tahun 475 H/1082 M. Berita tentang Islam di Jawa abad ke-11 dan 12 M masih sangat langka. Akan tetapi, sejak akhir abad ke-13 dan abad-abad berikutnya, terutama ketika Majapahit mencapai puncak kebesarannya, bukti-bukti adanya proses islamisasi sudah banyak, dengan ditemukannya beberapa puluh nisan kubur di Troloyo, Triwulan dan Gresik. Bahkan menurut berita Ma-huan tahun 1416, di pusat Majapahit maupun di pesisir, terutama di kota-kota pelabuhan, telah terjadi proses islamisasi dan sudah pula terbentuk masyarakat muslim.²⁹

Disebutkan dalam literatur sejarah bahwa di Jawa sudah ada kerajaan yang bercorak Islam yaitu Demak dan kerajaan-kerajaan di daerah pesisir utara Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, di samping masih ada kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu.

Di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta, Wali Songo bersepakat mengangkat Raden Patah menjadi raja pertama Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, dengan gelar Senopati Jimbun Ngabdurahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama. Raden Patah dalam menjalankan pemerintahannya, terutama dalam persoalan-persoalan agama, dibantu oleh para ulama, Wali Songo. Sebelumnya, Demak yang masih bernama Bintoro merupakan bagian dari Majapahit yang diberikan Raja Majapahit kepada Raden Patah. Daerah ini lambat laun menjadi pusat perkembangan agama Islam yang diselenggarakan oleh para wali.³⁰

Pada umumnya, Wali Songo terdiri dari Syakeh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel (Raden Rahmat), Sunan Giri (Raden Paku), Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah), Sunan

²⁸ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan*, hal. 44.

²⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, hal. 197.

³⁰ *Ibid.*, hal. 211.

Bonang (Makhdum Ibrahim), Sunan Drajat, Sunan Kalijaga (Raden Said), Sunan Kudus (Ja'far Shodiq), dan Sunan Muria (Raden Umar Said).

Pemerintahan Raden Patah berlangsung kira-kira di akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Dikatakan, ia adalah seorang anak Raja Majapahit (Brawijaya V) dari seorang ibu muslim keturunan Campa yang kemudian dihadiahkan ke Ario Damar (Adipati Palembang). Pada 1513 Demak berupaya merebut Malaka dari Portugis, namun gagal. Pada 1518, Raden Patah digantikan oleh anaknya, Adipati Unus atau Sabrang Lor.

Adipati Unus digantikan oleh Trenggono yang dilantik sebagai sultan oleh Sunan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Ia memerintah pada tahun 1524-1546. Pada masa sultan ketiga inilah Islam dikembangkan ke seluruh tanah Jawa, bahkan hingga ke Kalimantan Selatan. Penaklukan Sunda Kelapa berakhir pada tahun 1527 oleh gabungan Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fadhilah Khan. Majapahit dan Tuban jatuh ke bawah kekuasaan Demak diperkirakan pada tahun 1527 itu juga. Selanjutnya, pada tahun 1529, Demak berhasil menundukkan Madiun, Blora, (1530), Surabaya (1531), Pasuruan (1535), dan antara tahun 1541-1542 Lamongan, Blitar, Wirasaba dan Kediri (1544), Palembang dan Banjarmasin mengakui kekuasaan Demak.

Sementara daerah Jawa Tengah bagian selatan sekitar Gunung Merapi, Pengging, dan Pajang berhasil dikuasai berkat pemuka Islam, Syekh Siti Jenar dan Sunan Tembayat. Pada 1546, dalam penyerbuan ke Blambangan, Sultan Trenggono terbunuh. Ia dihantikan oleh anaknya, Prawoto. Masa pemerintahannya tidak berlangsung lama karena terjadi pemberontakan oleh adipati-adipati sekitar kerajaan Demak. Sunan Prawoto sendiri dibunuh oleh Aria Panangsang dari Jipang pada tahun 1549. Dengan demikian, riwayat kerajaan Demak berakhir dan dilanjutkan oleh kerajaan Pajang di bawah Sultan Adiwijaya atau Jaka Tingkir (menantu Sultan Trenggono) yang berhasil membunuh Aria Panangsang.³¹

Kerajaan Pajang pun dilanda konflik ketika Jaka Tingkir wafat pada 1587. Kekuasaannya diambil oleh Mataram yang didirikan Sutawijaya atau Panembahan Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatagama pada 1586. Kebesaran Mataram diraih pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma yang menggantikan Raden Mas Jolang (1601-1613). Kepahlawanan Sultan Agung dibuktikan dengan perlawanannya kepada Belanda pada 1628-1629, meskipun serangannya ke Batavia mengalami kegagalan.

Pada 1633, Sultan Agung mencetuskan kalender Jawa Islam. Setelah Sultan Agung wafat pada 1645, kekuasaan dipegang oleh Amangkurat I yang justru tunduk kepada Belanda sejak 1646 dan membantai para ulama pada 1670. Pada 1755, Belanda membagi Mataram menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pada 1757, Belanda membagi Surakarta menjadi wilayah Paku Buwono dan Mengkunegara. Pada 1813, Inggris membagi Yogyakarta menjadi wilayah Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam. Pada 1816, Inggris menyerahkan Indonesia kepada Belanda.³²

³¹ *Ibid.*, hal. 212.

³² Ahmad Choirul Rofiq, *Cara Memahami Sejarah Islam*, hal. 377.

Di Jawa Barat, kerajaan Islam pertama adalah Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Di awal abad ke-16, Cirebon masih merupakan sebuah daerah kecil di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Raja Pajajaran hanya menempatkan seorang juru labuhan di sana yang bernama Pangeran Walasungsang, seorang tokoh yang mempunyai hubungan darah dengan raja Pajajaran. Ketika berhasil memajukan Cirebon, ia sudah menganut Islam.

Islam sudah ada di Cirebon sekitar tahun 1470-1475. Akan tetapi, orang yang berhasil meningkatkan status Cirebon menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayat yang terkenal dengan Sunan Gunung Jati, pengganti dan keponakan dari Pangeran Walasungsang. Sunan Gunung Jati inilah yang peletak dasar kerajaan Cirebon dan kemudian Banten.

Sunan Gunung Jati masih ada hubungan darah dengan raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi, raja Sunda yang berkedudukan di Pakuan Pajajaran. Dari perkawinan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang tahun 1422, lahirlah tiga orang putra, yaitu Raden Walasungsang, Nyai Lara Santang dan Raja Sengara. Sunan Gunung Jati adalah putera Nyai Lara Santang dari perkawinannya dengan Maulana Sultan Mahmud alias Syarif Abdullah dari Bani Hasyim, ketika Nyai itu naik haji.³³

Setelah Cirebon resmi berdiri sebuah kerajaan Islam, Sunan Gunung Jati berusaha menjatuhkan kerajaan Pajajaran yang masih belum menganut Islam. Dari Cirebon juga, Sunan Gunung Jati menaklukkan daerah-daerah lain di Jawa Barat, seperti Majalengka, Kuningan, Kawali (Galuh), Sunda Kelapa, dan Banten. Daerah yang disebutkan terakhir yakni Banten, diserahkan ke anaknya, Sultan Hasanuddin, ketika Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon.

Hasanuddin merupakan putra hasil perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Nyai Kawunganten, seorang putri dari bupati Banten. Selain Hasanuddin dari pasangan ini juga lahir Ratu Winaon. Hasanuddin disertai wilayah Banten untuk melakukan Islamisasi. Oleh karena itu, tradisi menganggap bahwa ialah sebagai raja pertama dari kesultanan Banten. Banten yang saat itu hanya sebuah kadipaten berubah menjadi sebuah kerajaan di bawah pengawasan Demaks.³⁴

Pusat kekuasaan Banten yang semula berada di Banten Girang dipindahkan ke Surosowan (Banten pesisir) pada tanggal 8 Oktober 1526 atau 1 Muharram 933 H. Banten melepaskan diri dari kesultanan Demak, setelah Sultan Adiwijoyo tewas dalam sebuah pertempuran melawan Mataram. Setelah kesultanan Banten berdaulat atas daerahnya, Banten mengalami banyak kemajuan di segala bidang kehidupan.

Hasanuddin wafat pada tahun 1570. Setelah kematiannya, Maulana Hasanuddin dikenal dengan sebutan Sedakingking. Sebagai penggantinya dinobatkanlah Pangeran Yiusuf menjadi raja Banten kedua.³⁵ Maulana Yusuf gugur ketika ia melakukan serangan ke Palembang sehingga mendapat julukan Pangeran Seda ing Rana. Pada waktu itu, Belanda mulai datang ke Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman.

³³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, hal. 206.

³⁴ Michrob, Halwany dan A. Mudjahid Chudari, *Catatan Masa Lalu Banten*, cet. ke-4 (Serang: "Saudara", 2011), hal. 63.

³⁵ *Ibid.*, hal. 88.

Pengganti Maulana Muhammad adalah putranya yang masih kecil yang bernama Abulmafakhir Mahmud Abdulkadir (1596-1651). Abulmafakhir mengirim utusan ke Mekkah untuk meminta gelar sultan kepada syarif Mekkah.³⁶ Dengan demikian, raja pertama yang menggunakan gelar sultan yaitu Abulmafakhir Mahmud Abdulkadir ini.³⁷

Pada masa sultan Abulmafakhir ini terjadi beberapa kali peperangan antara Banten dan VOC yang berakhir dengan disetujuinya perjanjian damai pada tahun 1659.

Beralih ke belahan timur Nusantara, perkembangan Islam yang berlangsung dengan meningkatnya perdagangan maritim ditandai dengan berdirinya dua kerajaan Islam terkemuka, masing-masing Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan dan Ternate di Maluku. Seperti halnya Banten di Jawa dan Aceh di Sumatera, dua kerajaan tersebut mengalami kemajuan setelah terintegrasi ke dalam perdagangan maritim internasional menyusul penaklukan Malaka oleh Portugis. Didukung oleh sumber daya alam yang menghasilkan rempah-rempah, dua kerajaan tersebut berkembang sedemikian pesat menguasai jalur perdagangan di timur Nusantara, sehingga kemudian membuatnya harus berhadapan dengan kepentingan Portugis dan Belanda di Maluku.

Peralihan Gowa-Tallo ke Islam sekitar tahun 1602 dan 1607, berlangsung ketika para pedagang muslim, yang semula hanya terbatas sebagai komunitas keagamaan, membentuk satu kekuatan sosial dan politik serta sekaligus berfungsi sebagai agen islamisasi kerajaan.

Demikianlah sekitar dua tahun setelah sultan Alauddin masuk Islam pada 1607, penguasa Gowa-Tallo selanjutnya menjadikan Islam sebagai agama resmi serta sekaligus ideologi kerajaan. Bersamaan dengan penyebaran Islam, penguasa kerajaan Gowa-Tallo melakukan ekspansi kekuasaan dengan menaklukan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi. Ekspansi wilayah ini terutama didukung kepentingan ekonomi guna mendapatkan bahan-bahan komoditi yang memang tengah dicari para pedagang internasional.³⁸

Sejak Gowa-Tallo tampil sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan baik dengan Ternate yang telah menerima Islam dari Gresik/Giri. Di bawah pemerintahan Sultan Babullah, Ternate mengadakan perjanjian persahabatan dengan Gowa-Tallo. Ketika itulah raja Ternate berusaha mengajak Gowa-Tallo untuk menganut agama Islam, tetapi gagal. Baru pada waktu Datu' Ri Bandang datang ke kerajaan Gowa-Tallo, agama Islam mulai dimasuk ke kerajaan ini. Sultan Alauddin adalah raja pertama yang menganut agama Islam.

Penyebaran Islam setelah itu berlangsung sesuai dengan tradisi yang telah lama diterima oleh para raja, keturunan To Manurung. Tradisi ini mengharuskan seorang raja untuk memberitahukan “hal baik” kepada yang lain. Karena itu, kerajaan kembar Gowa-Tallo menyampaikan “pesan Islam” kepada kerajaan-kerajaan lain, seperti Luwu, yang lebih tua, Wajo, Soppeng dan Bone. Raja Luwu segera menerima “pesan Islam itu”.

³⁶ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan*, hal. 68.

³⁷ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*, Jilid 1 (Jakarta: Gramedia, 1987), hal. 114.

³⁸ Taufik Abdullah dan Endjat Djaenuderadjat, *Sejarah Kebudayaan Islam*, hal. 192.

Sementara tiga kerajaan lain menerima Islam berturut-turut Wajo (1610), Bone (1610) dan Gowa (1611). Raja Bone pertama yang masuk Islam dikenal dengan gelar Sultan Adam.³⁹

Namun, meski sudah Islam, peperangan-peperangan terjadi antar kerajaan sehingga melibatkan Belanda dalam mengatasinya. Pada akhirnya seperti juga kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara, kesultanan Gowa-Tallo dan Ternate berada di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda.

Adapun Islamisasi di Kalimantan Selatan berhasil dengan kesuksesan Pangeran Samudra atau Sultan Suryanullah (1526-1550) merebut kekuasaan di Kerajaan Banjar dengan bantuan militer dari Kerajaan Demak. Sejak pemerintahan Suryanullah kerajaan Banjar/Banjarmasin meluaskan kekuasaannya sampai Sambas, Batanglawai Sukadana, Kotawaringin, Sampit, Madawi dan Sambangan. Setelah Sultan Suryanullah wafat, kemudian digantikan oleh putranya yang tertua dengan gelar Sultan Rahmatullah yang masih mengirimkan upeti ke Demak yang pada waktu itu sudah menjadi kerajaan Pajang.⁴⁰

Selain itu, di Banjar terdapat ulama terkenal yang bernama Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari (1710-1812). Atas biaya kesultanan yang saat itu Sultan Tahlil Allah (1700-1745), Arsyad al-Banjari belajar ke Haramain selama beberapa tahun. Sepulangnya dari sana ia mengajarkan fikih dan menulis kitab yang berjudul *Sabil al-Muhtadin*. Ia juga ahli di bidang tasawuf dengan karyanya *Khaz al-Ma'rifah*.

Sebagaimana kerajaan lainnya, Kerajaan Banjar juga mengalami konflik internal di Banjar. Perlawanan dipimpin oleh Pangeran Antasari pada 1859, walaupun tetap tidak mampu mengalahkan Belanda.⁴¹

Di Kalimantan Timur terutama di Kutai Islamisasi masuk sekitar tahun 1575 ditandai dengan masuk Islamnya raja Kutai yang bernama Raja Mahkota. Selanjutnya kerajaan ini ikut menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah di sekitarnya.

Sementara Kalimantan Barat tepatnya di Pontianak, Islam dipercaya sudah masuk pada abad ke-18 atau tahun 1720 dengan hadirnya rombongan pendakwah dari Tarim (Hadramaut) untuk mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Mereka di antaranya Syarif Idrus bersama anak buahnya pergi ke Mampawah, tetapi kemudian menelusuri sungai ke arah laut memasuki Kapuas Kecil sampai ke suatu tempat yang menjadi cikal bakal kota Pontianak.

Perkembangan Islam di Nusantara, terutama pada masa-masa awal pembentukannya sebagai kekuatan sosial dan budaya, berlangsung sejalan dengan dinamika politik di kerajaan-kerajaan. Di wilayah tersebut, kerajaan-kerajaan atau biasa disebut kesultanan, dalam perkembangannya berfungsi tidak hanya sebagai pusat politik dan ekonomi, tetapi ia juga sekaligus sebagai basis berlangsungnya proses islamisasi.

Agama pada mulanya dipergunakan untuk memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak atau kerajaan-kerajaan yang bukan Islam, terutama yang mengancam kehidupan politik maupun ekonomi. Persekutuan antara Demak dan Cirebon dalam menaklukkan Banten dan Sunda Kelapa, misalnya, merupakan bukti akan hal tersebut. Contoh lainnya

³⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, hal. 224.

⁴⁰ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan*, hal. 86.

⁴¹ Ahmad Choirul Rofiq, *Cara Memahami Sejarah Islam*, hal. 378.

adalah persekutuan kerajaan-kerajaan Islam dalam menghadapi Portugis dan Kompeni Belanda yang berusaha memonopoli pelayaran dan perdagangan.

Meskipun demikian, kalau kepentingan politik dan ekonomi antarkerajaan-kerajaan Islam itu sendiri terancam, persamaan agama tidak menjadi bahwa permusuhan tidak ada. Peperangan di kalangan kerajaan-kerajaan Islam sendiri sering terjadi. Misalnya antara Pajang dan Demak, Ternate dan Tidore, Gowa-Tallo dan Bone. Oleh karena kepentingan yang berbeda di antara kerajaan-kerajaan yang ada, sering satu kerajaan Islam meminta bantuan kepada pihak lain, terutama Kompeni Belanda, untuk mengalahkan kerajaan Islam yang lain.

Hubungan antarkerajaan Islam lebih banyak terletak dalam bidang budaya dan keagamaan. Samudra Pasai dan kemudian Aceh yang dikenal dengan Serambi Mekkah menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Dari sini ajaran-ajaran Islam tersebar ke seluruh pelosok Nusantara melalui karya-karya ulama dan murid-muridnya yang menuntut ilmu ke sana.

Demikian pula halnya dengan Giri di Jawa Timur terhadap daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Karya-karya sastra dan keagamaan dengan segera berkembang di kerajaan-kerajaan Islam. Tema dan isi karya-karya itu seringkali mirip antara satu dengan yang lain. Kerajaan Islam itu telah merintis terwujudnya ungkapan kultural yang sama, yaitu Islam. Hal ini menjadi pendorong terjadinya interaksi budaya yang makin erat.⁴²

Namun seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan Islam tersebut berakhir sebagai akibat kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Asal-mula kedatangan mereka tujuannya adalah untuk melakukan perdagangan, yaitu mendapatkan rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa. Perseroan Amsterdam mengirim armada kapal dagangnya yang pertama ke Indonesia pada tahun 1598 di bawah pimpinan van Nede, van Heemskerck, dan van Warwijck. Di samping Amsterdam, juga datang beberapa kapal dari berbagai kota di Belanda. Angkatan ketiga berangkat tahun 1599 di bawah pimpinan van der Hagen, dan Angkatan keempat tahun 1600 di bawah pimpinan van Neck.⁴³

Melihat hasil yang diperoleh Perseroan Amsterdam itu, banyak perseroan lain berdiri yang juga ingin berdagang dan berlayar ke Indonesia. Pada bulan Maret 1602, perseroan-perseroan itu bergabung dan disahkan oleh Staten-General Republik dengan satu piagam yang memberi hak khusus kepada perseroan gabungan tersebut untuk berdagang, berlayar, dan memegang kekuasaan di Kawasan antara Tanjung Harapan dan kepulauan Solomon, termasuk kepulauan Nusantara. Perseroan tersebut bernama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC).⁴⁴

Isi piagam VOC tersebut jelas memberikan hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam rangka menunjang usaha perdagangannya. Sangat boleh jadi, hak politik itu diberikan karena hal yang sama juga berlaku bagi negara-negara Eropa lainnya, seperti Portugis yang datang seabad sebelum Belanda.

⁴² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, hal. 225.

⁴³ *Ibid.*, hal. 234.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 235.

Dalam pelayaran pertama, VOC mencapai Banten pada tahun 1596. Namun mereka diusir dari Banten karena sikap kasar mereka. Keberadaan Portugis dan Spanyol akhirnya tersingkirkan setelah kedatangan Belanda yang mengusir Portugis dari Malaka pada 1641. Demikian pula yang terjadi di Maluku. Kekuatan Belanda lebih unggul daripada Portugis maupun Spanyol sehingga penjajahan diambil alih Belanda.

VOC bermaksud ingin memonopoli perdagangan di nusantara. Sistem ini bertentangan dengan sistem tradisional yang dianut masyarakat. Sikap Belanda yang memaksakan kehendak dengan kekerasan makin memperkuat sikap permusuhan pribumi tersebut. Namun, secara politis VOC dapat menguasai sebagian besar wilayah Indonesia dalam waktu yang cepat.

Pada tahun 1798, VOC dibubarkan dengan saldo kerugian 134,7 gulden. Sebelumnya, pada 1795 izin operasinya dicabut. Kemunduran, kebangkrutan dan dibubarkannya VOC disebabkan oleh berbagai faktor antara lain pembukuan yang curang, pegawai yang tidak cakap dan korup, hutang besar, dan sistem monopoli serta sistem paksa dalam pengumpulan bahan-bahan hasil tanaman penduduk.⁴⁵

Dengan dibubarkannya VOC, pada pergantian abad ke-18 secara resmi Indonesia pindah ke tangan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni sampai 1942. Dalam rentang waktu tersebut, pemerintah Inggris sempat masuk ke Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Sampai tahun 1811, pemerintahan Hindia Belanda (nama Indonesia saat itu) tidak mengadakan perubahan yang berarti. Bahkan pada tahun 1816, Belanda malah memanfaatkan daerah jajahan untuk memberi keuntungan sebanyak-banyaknya kepada negeri induk, guna menanggulangi masalah ekonomi Belanda yang sedang mengalami kebangkrutan akibat perang.

Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda kemudian menerapkan Sistem Tanam Paksa yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Sistem yang lebih dikenal di Belanda dengan *cultuurstelsel* ini. Sistem ini mewajibkan para petani di Jawa untuk menanam tanaman-tanaman dagangan untuk diekspor ke pasar dunia. Ciri utama Sistem Tanam Paksa ini adalah keharusan bagi rakyat Jawa untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang, yaitu hasil-hasil pertanian mereka.⁴⁶

Keuntungan dari Sistem Tanam Paksa bagi Belanda segera terlihat. Hutang-hutang lama VOC lunas. Uang dalam jumlah yang sangat besar dikirim ke negeri Belanda dari tahun 1831 sampai dengan tahun 1877. Kubu-kubu pertahanan diperkuat. Jalan kereta api negara dibangun.

Di sisi lain, dampak kebijakan ini terhadap pribumi sangat memprihatinkan. Pada 1844, kelaparan melanda Jawa. Kekurangan beras terjadi di mana-mana sebagai akibat dipaksa untuk menanam komoditas yang lain, seperti tebu dan nila. Kenyataan ini mendapatkan penentangan dari pihak kaum liberal di parlemen Belanda. Akhirnya pada 1870, Sistem

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 236.

⁴⁶ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia: Kemunculan Penjajahan di Indonesia (1700-1900)*, Jilid IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), hal. 353.

Tanam Paksa dihentikan berganti dengan sistem ekonomi yang disebut sistem liberalisme.⁴⁷

Sistem liberalisme ini memberikan peluang bagi swasta untuk mengusakan kegiatan di Indonesia. Mereka mendirikan perkebunan-perkebunan besar di Jawa dan luar Jawa, seperti kopi, teh, gula dan kina. Sistem ini memiliki pandangan bahwa negara seharusnya tidak ikut campur dalam kehidupan ekonomi, tetapi membiarkannya pada kekuatan-kekuatan pasar. Satu-satunya tugas negara yaitu memelihara ketertiban umum.⁴⁸

Namun, harapan kaum liberalisme akan meningkatnya kesejahteraan rakyat pribumi ternyata tidak terwujud. Pada akhir abad ke-19, jelas terlihat merosotnya tingkat hidup mereka. Dengan kata lain, ide-ide kaum liberal untuk mengangkat perekonomian rakyat gagal terwujud. Akhirnya sistem ini tidak lebih baik daripada Sistem Tanam Paksa di masa lampau.⁴⁹

Kondisi demikian inilah yang menyebabkan timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat kepada pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan-perjuangan rakyat tersebut dalam skala yang bervariasi, baik berbentuk perlawanan besar maupun perlawanan kecil berupa kericuhan-kericuhan sosial. Sebagian besar perlawanan rakyat tersebut dilakukan dengan organisasi, strategi dan taktiknya yang masih sangat sederhana. Tidak heran perlawanan mereka mudah dipatahkan.

Selama periode antara abad ke-19 dan abad ke-20, hampir setiap daerah mengenal masa-masa pergolakan yang tercermin dalam bentuk gerakan-gerakan sosial dengan segala perkembangannya. Secara luas, gerakan-gerakan itu dapat diklasifikasikan menjadi empat golongan sesuai dengan landasan-landasan pokok yang mendorong timbulnya gerakan tersebut.

Pertama, jenis gerakan sosial yang melawan keadaan atau peraturan yang tidak adil. Dalam hal ini, ideologi pokok yang mendorong timbulnya gerakan ini adalah adanya rasa dendam terhadap kondisi sosial ekonomi yang kurang memberi tempat yang bebas bagi kehidupan para penduduknya. Kedua, jenis gerakan ratu adil, yaitu suatu gerakan yang bersifat mesianistik yang memuat harapan terhadap kedatangan ratu adil atau Imam Mahdi sebagai juru selamat rakyat. Ketiga, jenis gerakan Samin yang menentang pemerintah secara pasif dan menghindari kekerasan. Keempat, jenis gerakan sekte keagamaan yang kegiatannya bertujuan agar rakyat lebih rajin menjalankan kewajiban agamanya. Sebagai bukti adanya gerakan ini, sejak tahun 1860 banyak berdiri masjid, pesantren dan tarekat.⁵⁰

Setelah Sistem Tanam Paksa mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia dan protes sebagian warga negara Belanda, maka diterapkan Politik Etis (pendidikan, irigasi dan imigrasi) yang hakikatnya tetap untuk kepentingan Belanda. Meskipun hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang menikmati sekolah, namun kaum terdidik yang dihasilkan

⁴⁷ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hal 268.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 374.

⁴⁹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, hal. 376.

⁵⁰ Ahmad Choirul Rofiq, *Cara Memahami Sejarah Islam*, hal. 385.

mulai menunjukkan kesadaran nasionalismenya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sebagian referensi mengacu kepada sebuah organisasi yang dibuat oleh rakyat Indonesia sendiri yang bernama Budi Utomo untuk menunjukkan awal pergerakan nasional. Didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Wahidin Surohusodo bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa melalui ilmu pengetahuan.⁵¹ Organisasi ini dianggap sebagai fase awal pergerakan nasional Indonesia.

Pada tahun 1911, berdiri pula organisasi yang bernama Sarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Tujuan SDI adalah untuk menghimpun para pedagang pribumi (pedagang batik) agar dapat bersaing dengan para pedagang Cina. Istilah Islam pada Namanya lebih mewakili para anggotanya yang mayoritas muslim, sehingga kemudian para pendiri SDI, pada tanggal 18 September 1912, memutuskan untuk mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam (SI).⁵²

Sejak itu, SI berkembang dengan sangat pesat dan mempunyai basis massa yang kuat. Pada tahun 1919, jumlah anggota organisasi ini sekitar 2 juta orang. Tidak seperti Budi Utomo yang Jawa-sentris, SI berkembang ke daerah-daerah luar Jawa. Pemimpin SI, H.O.S. Tjokroaminoto (1882-1934), merupakan tokoh yang memiliki kharisma dan dianggap oleh orang-orang desa sebagai “Ratu Adil”.⁵³ Karena besarnya pengaruh Tjokroaminoto, ia disebut sebagai Raja Jawa tanpa Mahkota.

Pada perkembangan selanjutnya, SI berkerjasama dengan ISDV (*Indische Social-Democratische Vereniging*), sebuah organisasi yang berpaham sosialis dan komunis. Dengan interaksinya ini, SI kemudian pecah menjadi dua golongan, yakni Sarikat Islam Putih dan Sarikat Islam Merah. SI Putih dibawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, Abdul Muis dan Haji Agus Salim. Sedangkan SI Merah berada di bawah pimpinan Semaun dan Tan Malaka.

Pada periode awal abad ke-20 inilah, bermunculan organisasi-organisasi yang didirikan oleh rakyat Indonesia. Di antara organisasi-organisasi tersebut yaitu Jami’at Khair (1905), Muhammadiyah (1912), Taman Siswa (1922), Partai Komunis Indonesia (1920), Nahdlatul Ulama (1926), Partai Nasional Indonesia (1927), dan Gabungan Politik Indonesia (1939).

Di saat yang sama, situasi dunia internasional sedang mengalami pergolakan dengan adanya Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan peralihan penjajahan terhadap Indonesia dari penjajah Belanda ke penjajah Jepang antara tahun 1942-1945. Berbeda halnya dengan penjajahan Belanda yang sangat anti Islam, Jepang bersikap dengan mendekati umat Islam demi mencari dukungan dari rakyat Indonesia untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Organisasi keagamaan diakui keberadaannya.

Organisasi Islam Majelis Islam A’la Indonesia yang telah berdiri pada 1937 tetap diizinkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya. Demikian pula NU dan Muhammadiyah. Pada tanggal 23 November 1943, dibuatlah organisasi Masyumi (Majelis

⁵¹ Susanto Zuhdi dan Nursam, *Kamus Sejarah Indonesia Jilid I: Nation Formation (1900-1950)* (Jakarta: Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, t.t.), hal. 40.

⁵² *Ibid.*, hal. 251.

⁵³ Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, hal. 348.

Syuro Muslimin Indonesia) sebagai wadah untuk mempersatukan pergerakan umat Islam. Umat Islam diizinkan pula untuk terlibat dalam pelatihan militer dengan dibentuknya Hizbullah pada 15 Desember 1944.

A. Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan

Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia menemukan kesempatannya tatkala Jepang kalah perang dengan sekutu. Artinya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dengan tekanan dari para pemuda, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di hari Jum'at, tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, terlepaslah sudah bangsa Indonesia dari cengkeraman kuku-kuku penjajah bangsa-bangsa asing.

Di tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa berhasil menyepakati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan idil dan konstitusional negara Indonesia. Kendati pun penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, namun mereka menganggap Pancasila merupakan titik temu terbaik dari berbagai perbedaan keyakinan yang ada. Untuk mengelola persoalan-persoalan keagamaan didirikanlah Kementerian Agama pada 3 Januari 1946. Kementerian ini bertugas untuk mengelola pendidikan agama, perjalanan haji, pernikahan, pembinaan masjid, serta pemberdayaan wakaf, zakat, infaq dan sedekah.⁵⁴

Pendidikan tinggi yang diprakarsai umat Islam masa-masa awal kemerdekaan ini adalah Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan pada 8 Juli 1945 di Jakarta. Namun akibat agresi Belanda, STI tidak dapat berjalan. STI dipindahkan ke Yogyakarta bersamaan dengan kepindahan ibu kota ke sana. STI dibuka Kembali pada tanggal 10 April 1946 di Yogyakarta. Pada tanggal 22 Maret 1948, STI ini diubah namanya menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) dengan empat fakultas, yaitu Fakultas Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan.⁵⁵ Dengan demikian, UII merupakan perguruan tinggi Islam pertama yang memiliki fakultas-fakultas non-agama.⁵⁶

Dalam aspek politik, umat Islam melakukan muktamar yang dihadiri oleh 500 utusan organisasi sosial keagamaan pada tanggal 7 sampai 8 November 1945 di Yogyakarta dan menghasilkan memutuskan untuk mendirikan partai Masyumi.⁵⁷ Partai ini berhasil mengantarkan pada kepemimpinan Kabinet Natsir (1950-1951), Kabinet Sukiman (1951-1952) dan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956). Namun Masyumi kemudian dibubarkan pada tahun 1960 karena sejumlah pimpinan Masyumi terlibat dalam mendukung Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Kekuatan politik umat Islam bergeser ke Nahdlatul Ulama yang bersedia menerima konsep NASAKOM (Nasionalis, Agamis, dan Komunis) yang digagas Soekarno.

Sejarah perpolitikan umat Islam di Indonesia diwarnai dengan adanya Gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Gerakan kekerasan yang mengatasnamakan Islam ini terjadi di berbagai daerah di antaranya Jawa Barat pada 1949-1962, Jawa Tengah (1965),

⁵⁴ Ahmad Choirul Rofiq, *Cara Memahami Sejarah Islam*, hal. 388.

⁵⁵ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hal. 232.

⁵⁶ B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), hal. 123.

⁵⁷

Sulawesi (berakhir 1965), Kalimantan (berakhir 1963), dan Aceh (1953) yang berakhir dengan kompromi pada tahun 1957.⁵⁸

Pada masa Orde Baru, di era kepemimpinan Soeharto yang sangat kuat dan militeristik, masyarakat sipil dimandulkan suara dan perannya. Partai-partai Islam dipaksa bergabung ke dalam satu partai politik yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan) pada tahun 1970an. Suara-suara yang mengusung ditegakkannya syariat Islam nyaris tak terdengar.⁵⁹ Untuk mewadahi suara umat Islam pemerintah membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975. Pemerintah juga memberlakukan Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Undang-undang Peradilan Agama pada tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991.

Upaya-upaya pemerintah dalam merangkul umat Islam tersebut diwujudkan juga dengan persetujuannya meresmikan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1990. Setelah itu berdiri pula Bank Muamalat yang menjalankan proses perbankannya berdasarkan syariah yang bebas riba.

Dalam bidang pendidikan Islam, Orde Baru bersedia memasukkan lembaga-lembaga Pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren dan majelis taklim ke dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang Sisdiknas ini menjadikan kedudukan madrasah-madrasah sederajat dengan sekolah-sekolah umum. Untuk perguruan tinggi keagamaan Islam tersebar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di berbagai provinsi.

Orde Baru runtuh pada tahun 1998 bersamaan dengan datangnya Era Reformasi. Di era ini politik Islam kembali bangkit. Banyak partai politik yang berbasiskan Islam bermunculan. Kini, parpol bernuansa nasionalis religius Islam yang akan bersaing di pemilu tahun 2024 di antaranya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Umat.

Perkembangan pendidikan Islam di era reformasi semakin bertambah semarak. Di samping lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah yang sudah ada sejak dulu, kini terdapat fenomena baru dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan umum yang diintegrasikan ke dalam pendidikan Islam. Kecenderungan ini terjadi dari tingkat Pendidikan pra-sekolah hingga Pendidikan tingkat atas. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) menjadi PIAUD (Pendidikan Islam Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-Kanak) menjadi TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu), SD (Sekolah Dasar) menjadi SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu), SMP (Sekolah Menengah Pertama) menjadi SMPIT (Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu), dan SMA (Sekolah Menengah Atas) menjadi SMAIT (Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu). Di tingkat Pendidikan tinggi, perkembangan perguruan tinggi agama Islam negeri juga bertambah banyak. Saat ini jumlah Perguruan Tinggi Agama Islam negeri telah tersedia 24 IAIN, 29 UIN dan 5 STAIN.⁶⁰

⁵⁸ Beti Yanuri Posha, "Perkembangan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan", *Jurnal HISTORIA* Volume 3, Nomor 2, Tahun 2015, hal. 77.

⁵⁹ Muh. Syamsuddin dan Muh. Fatkhan, "Dinamika Islam pada Masa Orde Baru", *Jurnal Dakwah*, Vol. XI No. 2, Juli-Desember 2010, hal. 145.

⁶⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan_tinggi_islam_negeri_di_Indonesia, akses 14 Mei 2023.

KESIMPULAN

Perjalanan sejarah Islam di Indonesia merupakan proses panjang yang berlangsung secara bertahap melalui jalur perdagangan, dakwah, dan interaksi budaya yang kompleks, sehingga melahirkan corak keislaman yang khas, moderat, dan adaptif terhadap keragaman lokal. Kehadiran Islam tidak hanya mengubah struktur keagamaan masyarakat Nusantara, tetapi juga membentuk sistem politik melalui lahirnya kerajaan-kerajaan Islam yang berfungsi sebagai pusat kekuasaan, pendidikan, dan kebudayaan. Dinamika tersebut kemudian menghadapi tantangan besar ketika bangsa-bangsa Eropa datang membawa kolonialisme, yang menyebabkan perubahan sosial dan politik sekaligus memicu lahirnya gerakan-gerakan perlawanan dan organisasi modern yang memperkuat identitas dan kesadaran nasional umat Islam. Pasca kemerdekaan, Islam terus memainkan peran penting dalam kehidupan berbangsa, baik melalui institusi keagamaan, politik, maupun pendidikan hingga era Reformasi yang membuka ruang lebih luas bagi perkembangan Islam dalam berbagai bidang. Dengan demikian, sejarah Islam di Indonesia menunjukkan kesinambungan antara ajaran Islam, realitas sosial, dan dinamika politik yang terus membentuk karakter keislaman Indonesia hingga masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Djaenuderadjat, E. (2015). *Sejarah kebudayaan Islam Indonesia* (Jilid 1). Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud.
- Atjeh, A. B. (1971). *Sekitar masuknya Islam ke Indonesia*. Ramadhani.
- Azra, A. (1995). *Jaringan ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII: Melacak akar-akar pembaruan pemikiran Islam di Indonesia* (Cet. 3). Mizan.
- Boland, B. J. (1985). *Pergumulan Islam di Indonesia*. Grafiti Pers.
- Dhofier, Z. (1983). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai*. LP3ES.
- Djoened Poesponegoro, M., & Notosusanto, N. (1990). *Sejarah nasional Indonesia III*. Balai Pustaka.
- Djoened Poesponegoro, M., & Notosusanto, N. (2019). *Zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia* (Cet. 7). Balai Pustaka.
- Djoened Poesponegoro, M., & Notosusanto, N. (2019). *Sejarah nasional Indonesia: Kemunculan penjajahan di Indonesia (1700–1900)* (Jilid IV). Balai Pustaka.
- Dewan Redaksi. (1997). *Ensiklopedi Islam* (Cet. 4). Ichtiar Baru van Hoeve.
- Halwany, M., & Chudari, A. M. (2011). *Catatan masa lalu Banten* (Cet. 4). Saudara.
- Hasymi, A. (Ed.). (1989). *Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia*. Al-Ma'arif.
- Kartodirdjo, S. (1987). *Pengantar sejarah Indonesia baru: 1500–1900* (Jilid 1). Gramedia.
- Posha, B. Y. (2015). Perkembangan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. *Jurnal HISTORIA*, 3(2).
- Rahman, A. (2021). Peran Kerajaan Aceh melawan penjajahan dan menyebarkan Islam di Nusantara pada abad 16–18 M. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 8(5).
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia modern 1200–2004* (S. Wahono et al., Trans.). Serambi Ilmu Semesta.
- Rofiq, A. C. (2019). *Cara memahami sejarah Islam*. IRCiSoD.
- Rukiati, E. K., & Hikmawati, F. (2006). *Sejarah pendidikan di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Shihab, A. (1998). *Membendung arus: Respons gerakan Muhammadiyah terhadap penetrasi misi Kristen di Indonesia*. Mizan.

- Suryanegara, A. M. (1996). *Menemukan sejarah: Wacana pergerakan Islam di Indonesia*. Mizan.
- Syamsuddin, M., & Fatkhan, M. (2010). Dinamika Islam pada masa Orde Baru. *Jurnal Dakwah*, 11(2).
- Wikipedia. (2023). *Daftar perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia*. Diakses 14 Mei 2023 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan_tinggi_Islam_negeri_di_Indonesia
- Zuhdi, S., & Nursam. (t.t.). *Kamus sejarah Indonesia Jilid I: Nation formation (1900–1950)*. Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zuhri, S. (1978). *Sejarah kebangkitan Islam dan perkembangannya*. Al-Ma'arif.
- Yatim, B. (2004). *Sejarah peradaban Islam* (Cet. 16). RajaGrafindo Persada.